

SKRIPSI

KEKUATAN MENGIKAT SURAT PERINTAH KERJA DARI EKSPORTIR KEPADA FORWARDER MENURUT HUKUM PERJANJIAN

Per 121/05

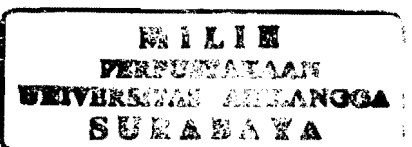
Ros
k



ROSITA

NIM. 030010808 U

**MINAT BIDANG HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

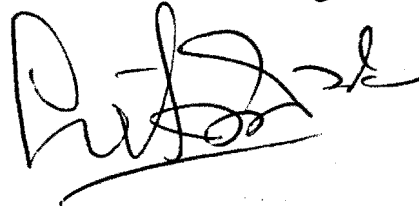


**KEKUATAN MENGIKAT SURAT PERINTAH KERJA DARI
EKSPORTIR KEPADA FORWARDER MENURUT
HUKUM PERJANJIAN**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



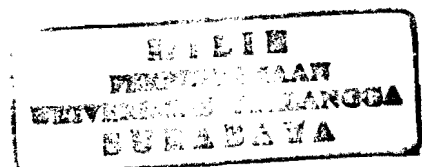
Lisman Iskandar, S.H., M.S.
NIP. 130 675 526

Penyusun,



Rosita
NIM. 030010808 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Surat perintah kerja adalah merupakan perjanjian konsensual dalam bentuk tertulis, dan telah memenuhi asas konsensualitas yang dipersyaratkan oleh pasal 1320 BW, yakni yang merupakan bagian yang fundamental dalam hukum perjanjian. Oleh karena tidak akan ditemukan adanya suatu perjanjian tanpa terlebih dahulu dipenuhi adanya konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, atau dapat disimpulkan bahwa persesuaian kehendak sudah cukup untuk timbulnya keterikatan kontraktual (*consensualisme*). Pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya adalah sah dalam arti mengikat sejak tercapainya kesepakatan mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan yakni pada saat dikeluarkannya surat perintah kerja tersebut dari eksportir kepada forwarder, serta telah memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian, sebagaimana termaktub dalam pasal 1338 BW yang menyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-gundang bagi mereka yang membuatnya”.
- b. Tindakan forwarder yang tidak dapat memenuhi prestasinya mengirim barang tepat waktu sampai ditempat tujuan sesuai isi surat perintah kerja yang telah disepakati bersama dapat di kategorikan kedalam wanprestasi dan pihak eksportir yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pemenuhan prestasi kepada forwarder.

Dengan telah dikeluarkannya surat perintah kerja dari eksportir kepada forwarder maka telah terjadi perikatan dalam suatu hubungan hukum yang mengikat yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perikatan tersebut dapat di paksakan, akibat adanya hubungan timbal balik yang menimbulkan hak (*right*) dan kewajiban (*obligation*). Karena surat perintah kerja tersebut juga telah memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian, sebagaimana terkandung dalam pasal 1313 BW.

2. Saran

- a. Walaupun secara tegas telah dijelaskan dalam pasal 1338 BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, namun karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum khususnya tentang hukum perikatan, maka dalam kehidupan social bermasyarakat masih ada saja yang beranggapan bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mempunyai kekuatan mengikat bila telah dituangkan dalam suatu akta otentik. Dalam surat perintah kerja yang dibahas dalam skripsi ini tidak secara rinci dan tegas dijelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak serta konsekwensinya bila salah satu pihak wanprestasi. Dalam menyusun surat perintah kerja atau surat-surat sejenis lainnya, para pihak biasanya lebih menekankan aspek ekomoni daripada aspek hukum. Untuk itu agar tidak ada pihak-pihak yang akan dirugikan akibat pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, sebaiknya para eksportir dan forwarder

memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawannya bukan saja pelatihan dalam bidang ekspor impor (exim) tapi juga pelatihan dan pendidikan dalam bidang hukum, misalnya dengan mengikuti seminar-seminar tentang tehnik perancangan kontrak serta melibatkan karyawan dari defisi legal untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan draft/perancangan shipping instruction/surat perintah kerja atau surat-surat perjanjian sejenis lainnya agar suatu kontrak atau perjanjian tersebut tidak saja berisi klausula-kluasula dari segi ekonomis tapi juga mengandung klausula-klausula dari segi hukum agar dapat menghindari hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak di kemudian hari selama perjanjian kerjasama tersebut berlangsung.

- b. Apabila salah satu pihak gagal melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana tertuang dalam surat perintah kerja dan terjadi perselisihan diantara mereka, maka disarankan sebaiknya diselesaikan melalui proses sengketa alternatif, seperti dengan musyawarah, bernegosiasi dan mediasi, serta perdamaian melalui arbitrase demi terciptanya penyelesaian yang bersifat win-win solution (tidak ada pihak yang merasa dikalahkan atau sama-sama menang). Karena dalam dunia bisnis cara ini adalah yang paling tepat dilakukan sehingga tidak akan ada cacat-cacat yang bisa menghancurkan hubungan maupun nama baik para pihak.